BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem hukum dalam suatu komunitas menetapkan aturan bagi setiap aspek kehidupan manusia dan setiap pola perilaku, yang pada dasarnya dapat dipisahkan menjadi dua kategori utama: hukum privat serta hukum publik, yang sering disebut sebagai hukum negara. Hukum publik berfokus pada regulasi hubungan antara negara dan warganya, mencakup hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Sementara itu, hukum privat menangani hubungan antara individu atau lebih, dengan penekanan pada kepentingan perorangan, dan ini dikenal sebagai hukum perdata (Asikin.S.H.S.U, 2018).

Dalam fungsinya, hukum perdata dapat diuraikan menjadi dua bagian utama, yakni hukum materiil serta hukum formil. Hukum materiil mencakup regulasi terkait hak serta kewajiban antara subjek hukum, dimana telah disusun secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sementara itu, hukum formil berfokus pada cara memastikan kepatuhan terhadap hukum perdata materiil melalui proses hukum yang lebih dikenal sebagai hukum acara. Istilah "acara" di sini merujuk pada proses penyelesaian perkara melalui pengadilan. (Zia et al., 2020).

Dalam proses beracara atau proses persidangan secara *Konvensional* yaitu proses persidangan yang dilakukan dengan tatap muka langsung di ruang persidangan, proses ini melibatkan kehadiran para pihak, termasuk Masyarakat yang ingin menyaksikan langsung bagaimana proses persidangan *konvensional* itu dilaksanakan. Proses persidangan *Konvensional* terdapat tahapan-tahapan yang

harus dilalui, seperti Upaya perdamaian, pembacaan permohonan/gugatan, jawaban para pihak, replik dan duplik, pembuktian, dan kesimpulan serta pembacaan putusan/penetapan.

Persidangan *konvensional* mengikuti tata cara yang diatur dalam peraturan acara hukum perdata yang berlaku serta dilakukan dengan mematuhi asas-asas hukum acara perdata seperti asas terbuka untuk umum, karena pada prakteknya persidangan *konvensional* akan diumumkan serta dijadikan terbuka untuk umum oleh hakim yang memimpin jalannya persidangan tersebut dan Masyarakat bisa melihat dan menilai proses persidangan tersebut. Karena pada prinsipnya bahwa persidangan *konvensional* dilakukan secara terbuka dan transparan, sehingga dapat dihadiri oleh siapa saja yang berkepentingan. Asas terbuka untuk umum merupakan prinsip yang mendasari bahwa proses persidangan *konvensional* harus dapat diakses oleh Masyarakat umum tanpa adanya hambatan atau diskriminasi. Persidangan *konvensional* yang terbuka untuk umum harus mematuhi prinsip-prinsip persidangan yang terbuka, dimana tiap orang berhak hadir serta masuk ke ruang persidangan untuk mengikuti proses persidangan.

Proses persidangan *konvensional* didasari oleh *HIR (Herzien Inlandsch Reglement)* yang merupakan aturan hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan suatu persidangan untuk perkara perdata. Pasal 124 sampai dengan pasal 177 mengatur mengenai cara/ tahapan persidangan, termasuk tahapan pembuktian. Sementara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) mengatur terkait tata cara untuk penyelesaian perkara perdata di pengadilan, karena Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yakni dasar hukum yang penting pada system peradilan khususnya dalam penyelesaian perkara perdata.

Asas persidangan terbuka untuk umum (*Openbaarheid van Rechtspraak*) diatur pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Terkait Kekuasaan Kehakiman yang mengatur tentang persidangan terbuka untuk umum, yakni:

1. Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
2. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
3. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Ditegaskan dalam pasal 13 ayat (1,2, serta 3) Undang-Undang Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 bahwa persidangan terbuka untuk umum yaitu membuka ruang untuk tiap masyarakat dalam menghadiri proses persidangan secara langsung sebagai bentuk transparansi keadilan, dan diketahui oleh semua masyarakat (El Hilmi & Astuti, n.d.).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa proses persidangan *konvensional* telah mematuhi asas terbuka untuk umum yang diatur didalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan Upaya untuk memastikan bahwa proses hukum dapat diakses dan di ketahui oleh semua orang secara adil dan transparan sehingga Masyarakat dapat menilai jalannya persidangan dan memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara objektif. Dapat diungkapkan bahwa, Asas Terbuka Untuk Umum ini mencerminkan transparansi dalam proses peradilan, di mana masyarakat memiliki akses terbuka dan mudah untuk mengakses informasi terkait proses persidangan, putusan, dan perkembangan perkara hukum, Karena proses dalam persidangan

tersebut merupakan konsumsi public (Nurselly Endang & Baried Ramadhan, 2021)

Seiring dalam Perkembangan Teknologi Informasi serta komunikasi makin pesat dengan adanya perkembangan teknologi tersebut merupakan sebuah modernisasi bagi dunia hukum dan mengganti proses persidangan *konvesinal* menjadi proses persidangan secara elektronik (*E-Litigation*), di keluarkannya Produk Mahkamah Agung yang diresmikan pada tahun 2020 yaitu *E-Court* yang diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik dimana merupakan sebuah bentuk pelayanan pada Masyarakat yang di dalamnya berfungsi untuk melakukan Pendaftaran Perkara *Online (E-Filling)*, Pembayaran Panjar Biaya *Online (E-Payment)*, Pemanggilan Pihak Secara *Online (E-Simmons)*, serta juga Persidangan Secara *Online (E-Litigation)* dengan adanya *E-Court* ini diharap mampu dalam lebih meningkatkan pelayanan di Pengadilan Negeri Majalengka dengan lebih baik (E-Court, 2019).

Persidangan Elektronik (*E-Litigation*) diatur di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa Persidangan Elektronik (*E-Litigation*) ialah sebuah rangkaian tahap pemeriksaan serta pengadilan suatu perkara oleh lembaga peradilan yang didukung oleh teknologi serta komunikasi, yang khususnya berlaku pada prosedur Persidangan Jawab Menjawab dalam konteks persidangan elektronik (*E-Litigation*) di Pengadilan Negeri Majalengka, dalam perkembangannya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administarasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Negeri diubah menjadi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Adminitrasi Perkata dan Persidangan di Pengadilan Negeri.

Adapun beberapa aspek perubahan system Persidangan Elektonik (*E-Litigation*) diantaranya yaitu Persidangan Elektonik (*E-Litigation*) tidak perlu persetujuan Tergugat, Perluasan Jenis Perkara, Perluasan Konsep Domisili Elektonik, Perluasan Pengguna Layanan, Mengakomodir Perkara *Prodeo* dan Pemanggilan pihak Non-Pengguna SIP (S.Sy, 2023). Dengan di keluarkannya Peraturan Mahkamah Agung tersebut maka Mahkamah Agung Republik Indonesia telah merespon dengan baik atas perkembangan teknologi Informasi dan Komunikasi yang ada.

Dalam Penerapannya Persidangan Elektonik (*E-Litigation*) bersinggungan dengan Asas Terbuka Untuk umum karena dalam Hukum acara perdata terdapat asas yaitu asas persidangan terbuka untuk umum serta di tegaskan juga dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 pasal 13 Tentang Kekuasaan Kehakiman Karena yaitu Semua Sidang Pemeriksaan Pengadilan ialah Terbuka Untuk Umum, Kecuali Undang-Undang yang menentukan lain, (Eri Safira, M.H, 2017).

Dalam Ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Pengganti PERMA Nomor 1 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Persidangan Elektonik (*E-Litigation*) ialah sebuah rangkaian tahap pemeriksaan serta pengadilan suatu perkara oleh lembaga peradilan yang didukung oleh teknologi serta komunikasi. Apakah asas terbuka untuk umum ini telah terpenuhi atau belum karena Persidangan Elektonik (*E-Litigation*) yang didalamnya hanya memuat mengenai aturan mengenai persidangan perdata secara Elektonik (*E-Litigation*) yang mana dalam kenyataanya dalam Persidangan Elektonik (*E-Litigation*) ini hanya diperuntukan untuk jawab menjawab antara para pihak sampai dengan putusan melalui email, sementara itu jawab menjawab dilakukan melalui email yang sudah di daftarkan

dan dilakukan antara pengadilan dan para pihak pengugat maupun tergugat saja dan tidak dihadiri oleh para pihak dan juga tidak dapat dihadiri oleh Masyarakat umum karena teknis persidangan elektronik (*E-Litigation*) ini hanya mengharuskan para pihak baik pengugat maupun tergugat cukup menggunggah dokumen yang sudah di tentukan kedalam system *E-Court* tanpa harus mendatangi pengadilan untuk melakukan persidangan.

PERMA Nomor 7 tahun 2022 merupakan bentuk peraturan penyempurnaan dari peraturan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. PERMA ini mengatur tentang kewajiban para pihak untuk berperkara perdata secara Elektronik (*E-Litigation*) dimulai dari pendaftaran perkara secara elektronik kemudian dilanjutkan oleh tahap mediasi. apabila tidak tercapai kesepakatan perdamaian dalam mediasi, maka agenda persidangan akan dilanjutkan sesuai dengan alur peridangan seperti sebelumnya yang mencakup tahap jawaban gugatan, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan. (Harjono & Ajeng Anggraini, 2024)

Di Pengadilan Negeri Majalengka perkara Perdata yang masuk dari tahun 2019 sampai dengan 2023 dengan menggunakan sarana Persidangan Elektronik (*E-Litigation*) diantaranya yaitu :

Tahun	Gugatan
2019	4 Perkara
2020	18 Perkara
2021	-
2022	18 Perkara

2023	20 Perkara
------	------------

Dengan penjelasan tersebut, peneliti merasa tertarik untuk mengeksplorasi serta memahami lebih dalam mengenai Penerapan Persidangan Elektronik (*E-Litigation*) apakah sudah memenuhi asas terbuka untuk umum sebagai bentuk Transparansi Keadilan, Oleh Karena itu peneliti berkeinginan mengambil judul **“PENERAPAN PROSES SIDANG ELEKTRONIK (*E-LITIGATION*) DIHUBUNGGAN DENGAN ASAS TERBUKA UNTUK UMUM SEBAGAI BENTUK TRANSPARANSI KEADILAN DI PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA”**.

B. Identifikasi Masalah

Dengan mempertimbangkan informasi latar belakang yang telah disajikan, serta dengan tujuan supaya penelitian ini mendapat hasil yang optimal, maka rumusan masalah permasalahan yang akan difokuskan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Penerapan asas terbuka untuk umum dalam Persidangan Elektronik (*E-Litigation*) di Pengadilan Negeri Majalengka?
2. Bagaimana solusi penerapan asas terbuka untuk umum dalam persidangan elektronik (*E-Litigation*) di Pengadilan Negeri Majalengka?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada konteks penelitian ini, tujuan penelitian dapat dijabarkan sebagaimana dibawah :

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis Penerapan Asas Terbuka Untuk Umum dalam Persidangan Elektronik (*E-Litigation*) di Pengadilan Negeri Majalengka
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan Menganalisis Bagaimana solusi penerapan asas terbuka untuk umum dalam persidangan elektronik (*E-Litigation*) di Pengadilan Negeri Majalengka

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan temuan penelitian ini dapat memberi manfaat sebagaimana dibawah :

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan bahwa kontribusi teoretis dari penelitian ini dapat meluaskan pemahaman dan pengembangan hukum pada konteks sistem persidangan elektronik (*E-Litigation*) yang efektif dan memastikan bahwa asas terbuka untuk umum dapat terwujud dalam persidangan elektronik (*E-Litigation*) sebagai bentuk transparansi keadilan.

2. Kegunaan Praktis

Dalam konteks penelitian ini, diharap dapat menyajikan pemikiran serta informasi yang konkret serta bermanfaat, terutama bagi:

a) Bagi Pembentukan Undang-Undang

Peneliti berharap bahwa temuan penelitian ini akan menjadi panduan yang informatif mengenai pelaksanaan persidangan elektronik (*E-Litigation*) harus diterapkan sesuai dengan asas terbuka untuk umum dan memastikan transparansi pada proses hukum.

b) Bagi Masyarakat

Peneliti berharap bahwa temuan penelitian ini dapat memberi manfaat kepada masyarakat, memperkaya pemahaman mereka terkait hukum yang bersifat lebih modern dan bisa menjadi literasi digital bagi masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sebagai dasar negara, dimana mengindikasikan bahwa Indonesia yakni negara yang berdasar pada hukum. Dalam konteks UUD 1945, dijelaskan bahwa hukum terbentuk atas inisiatif dan kesadaran setiap individu di dalam masyarakat. Langkah ini bertujuan supaya hukum dapat beroperasi sesuai dengan aspirasi masyarakat, yang menginginkan kerukunan dan perdamaian dalam kehidupan bersama. Pada dasarnya, peran hukum adalah untuk membimbing masyarakat menuju kesejahteraan dalam hidupnya. Dalam konteks negara hukum, dikenal pula Teori Stufenbau yang menggambarkan sistem hukum sebagai tangga dengan norma hukum yang berjenjang. Urgensi teori stufenbau dalam penulisan ini yaitu memberikan kerangka teoritis yang kuat untuk memahami dan menganalisis implementasi persidangan secara elektronik (*E-Litigation*) dengan memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat dalam sistem peradilan. Artinya, norma hukum yang lebih rendah harus selalu mengacu pada norma hukum yang lebih tinggi, serta kaidah hukum tertinggi harus tetap mengikuti norma hukum yang lebih tinggi (Fartini, n.d.).

Negara Hukum pada dasarnya adalah suatu entitas di mana setiap tindakan yang dilakukannya didasarkan pada landasan hukum, dengan tujuan untuk menjamin dan mewujudkan keadilan bagi seluruh warganya. Salah satu ciri khas yang mencirikan negara hukum ialah keberadaan ketentuan hukum yang menjadi

pedoman perilaku bagi individu maupun pemerintah. Teori negara hukum sendiri mengedepankan konsep bahwa suatu negara harus berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum serta memberi apresiasi yang tinggi pada hak asasi manusia. Teori ini muncul sebagai reaksi terhadap kekuasaan absolut yang dimiliki oleh penguasa pada masa lalu. Dalam teori negara hukum, hukum dianggap sebagai aturan yang mengikat semua pihak, termasuk penguasa, dan harus ditegakkan secara adil dan merata.

Dalam konteks Revisi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2002, istilah Negara Hukum Indonesia, dimana sebelumnya sering dikaitkan dengan "*Rechtsstaat*" dan juga istilah "*rule of law*" yang awalnya hanya tercantum dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, secara tegas dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) dimana menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Dalam konsep Negara Hukum ini, diidealisasikan bahwa hukum harus menjadi patokan utama dalam dinamika kehidupan kenegaraan. Oleh karena itu, istilah ataupun sebutan yang umum digunakan dalam bahasa Inggris untuk merujuk pada konsep Negara Hukum ialah "*the rule of law*". Gagasan, cita-cita, atau ide mengenai Negara Hukum, selain terkait pada konsep "*rechtsstaat*" serta "*the rule of law*", juga terkait dengan konsep "*nomocracy*", yang berasal dari kata "*nomos*" serta "*cratos*". Kata nomokrasi dapat diperbandingkan dengan "*demos*" serta "*cratos*" ataupun "*kratien*" dalam demokrasi. "*Nomos*" berarti norma, sedangkan "*cratos*" yakni kekuasaan. Dalam konteks ini, norma ataupun hukum dianggap sebagai elemen penentu pada pelaksanaan kekuasaan, dan dengan demikian, istilah nomokrasi berkaitan erat dengan konsep kedaulatan hukum ataupun prinsip bahwa hukum

memiliki kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal ini dapat dikaitkan dengan prinsip “*rule of law*” yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon “*the Rule of Law, and not of Man*”. Sebenarnya, yang dipandang sebagai pemimpin ialah hukum itu sendiri, bukan individu (Asshiddiqie S.H, n.d.).

Menurut A.V. Dicey, terdapat setidaknya tiga elemen kunci dalam konsep “*the rule of law*”. Ketiga unsur tersebut melibatkan supremasi aturan hukum ataupun superioritas mutlak hukum, kesetaraan di hadapan hukum atau dikenal sebagai persamaan di muka hukum, serta jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi serta oleh lembaga peradilan. Dalam pandangan “*the rule of law*”, hukum konstitusi bukanlah sumber hukum, melainkan yakni hasil dari hak-hak individu yang diformulasikan serta ditegaskan oleh pengadilan. Perspektif A.V. Dicey sering dianggap sebagai pandangan yang murni dan sempit, sebab esensi dari tiga prinsip dasar yang ditekankan dalam “*the rule of law*” ialah common law sebagai dasar untuk melindungi kebebasan individu dari potensi penyalahgunaan kekuasaan penguasa. Perlindungan common law hanya mencakup sejumlah kebebasan pribadi tertentu, seperti halnya kebebasan berbicara, sementara tidak dapat menjamin kesejahteraan ekonomi ataupun sosial warganegara, seperti halnya perlindungan fisik yang memadai, akses ke perumahan layak, pendidikan, jaminan sosial, ataupun lingkungan yang baik, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam konteks ini, negara hanya dianggap sebagai negara hukum formal, yakni negara yang bersifat pasif dan tidak proaktif. Sifat tersebut mencerminkan fungsi negara yang terbatas pada menjalankan serta mematuhi apa yang tertulis dalam konstitusi negara itu sendiri. Di era modern, konsep Negara Hukum di

Eropa Kontinental dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, serta lain-lain, menggunakan istilah Jerman, yakni "*rechtsstaat*". Sementara itu, dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara Hukum diartikulasikan terutama oleh A.V. Dicey dengan istilah "*The Rule of Law*".

Menurut Julius Stahl, ide dari Negara Hukum yang dikenalnya sebagai "*rechtsstaat*" mencangkup empat aspek utama, yakni:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.

Sementara itu, A.V. Dicey menjelaskan tentang tiga karakteristik utama yang melekat dalam setiap Negara Hukum, yang dikenalnya sebagai "*The Rule of Law*", yakni:

1. *Supremacy of Law.*
2. *Equality before the law.*
3. *Due Process of Law.*

Empat prinsip yang dikembangkan oleh Julius Stahl dalam konsep "*rechtsstaat*" pada dasarnya dapat disatukan dengan tiga prinsip "*Rule of Law*" yang dipropagandakan oleh A.V. Dicey, sehingga dapat menjadi penanda karakteristik Negara Hukum modern pada era saat ini. Bahkan, menurut "*The International Commission of Jurists*", prinsip-prinsip Negara Hukum ini diperluas dengan penambahan prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak atau "*independence and impartiality of judiciary*", yang dianggap semakin esensial

dalam setiap negara demokrasi pada zaman sekarang. Prinsip-prinsip yang diakui sebagai ciri utama Negara Hukum oleh “*The International Commission of Jurists*” tersebut ialah:

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak

Dalam setiap komunitas, hukum senantiasa hadir, dan tidak ada masyarakat yang tidak memiliki sistem hukum, termasuk masyarakat yang bersifat tradisional. Di setiap komunitas, terdapat pula perkembangan hukum yang tumbuh dan berkembang, menjadi pedoman perilaku, dan dikenal dengan istilah “*The Living Law*”, yang muncul dalam bentuk kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan, dan sebagainya. Istilah “*The Living Law*” diperkenalkan oleh Eugen Ehrlich, yang mengemukakan bahwa evolusi hukum berpusat pada dinamika masyarakat itu sendiri, bukan semata pada proses pembentukan hukum oleh negara, putusan hakim, atau pengembangan ilmu hukum. Masyarakat dianggap sebagai sumber utama hukum. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa “*The Living Law*” merupakan serangkaian norma yang tumbuh seiring dengan perkembangan masyarakat, menjadikan hukum sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat. Hukum bukan hanya terbentuk oleh masyarakat, tetapi juga berfungsi untuk melayani kepentingan masyarakat (Hadi, 2017).

Dalam konteks negara hukum, penegakan hukum menjadi esensial dan menjadi suatu proses di mana usaha dilakukan untuk memastikan norma-norma hukum diimplementasikan dengan efektif sebagai panduan konkret untuk perilaku

di dalam masyarakat. Hal ini terkait dengan peran hukum dalam dinamika kehidupan sosial dan politik di dalam masyarakat dan negara.

Menurut Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa :

“Penegakan Hukum merupakan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa norma-norma hukum berfungsi secara efektif sebagai panduan untuk perilaku dalam interaksi dan hubungan hukum di dalam kehidupan sosial dan negara.” (Asshiddiqie S.H, n.d.).

Hukum dalam kehidupan bersama dan konteks negara, penegakan hukum dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Dari segi subjek, pelaksanaan hukum bisa melibatkan berbagai pihak atau hanya merujuk pada upaya yang dilakukan oleh pihak tertentu dalam arti yang lebih terbatas. Pada dimensi yang lebih luas, proses penegakan hukum melibatkan seluruh pelaku hukum dalam segala hubungan hukum. Setiap orang yang mengikuti norma-norma atau bertindak sesuai atau tidak sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku dianggap sebagai pelaksana atau penegak hukum. Dalam konteks yang lebih terbatas, dari perspektif subjeknya, Penegakan Hukum diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tertentu untuk memastikan bahwa suatu aturan hukum diterapkan dengan benar. Dalam menjaga keberlakuan hukum ini, jika perlu, aparat penegak hukum diizinkan menggunakan tindakan paksa. Pemahaman tentang penegakan hukum dapat dilihat dari perspektif objeknya, yakni aspek hukumnya. Dalam hal ini, konsep tersebut mencakup dimensi yang luas dan juga yang lebih terbatas. Pada dimensi yang luas, penegakan hukum juga mencakup nilai-nilai keadilan yang terdapat dalam isi formal aturan hukum dan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Namun, dalam arti yang lebih terbatas, penegakan hukum hanya berkaitan dengan penerapan peraturan formal

dan tertulis semata. Oleh karena itu, ketika menerjemahkan istilah “*law enforcement*” ke dalam bahasa Indonesia, kita dapat menggunakan istilah "Penegakan Hukum" dalam arti yang lebih luas dan juga dapat memakai istilah "Penegakan Peraturan" dalam arti yang lebih terbatas, untuk membedakan antara formalitas peraturan hukum yang tertulis dengan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Dalam konteks “*the rule of law*” terdapat makna pemerintahan yang dilandasi oleh hukum, tetapi tidak hanya dalam arti formal, melainkan juga mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam hukum tersebut. Dengan demikian, penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formal yang lebih terbatas maupun dalam arti materi yang lebih luas, sebagai panduan dalam setiap tindakan hukum, baik oleh subjek hukum terkait maupun oleh aparat penegak hukum yang secara resmi ditugaskan dan diberi wewenang oleh undang-undang untuk menjamin implementasi norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan negara (S Arliman, n.d.).

Gustav Radbruch menyampaikan pandangannya bahwa hukum yang baik ialah:

“Ketika hukum mencakup nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, meskipun ketiganya merupakan nilai dasar hukum, setiap nilai memiliki tuntutan yang unik sehingga potensi konflik dan ketegangan antara nilai-nilai tersebut dapat muncul. Terdapat tiga (3) elemen pokok/tujuan dalam pelaksanaan hukum, yakni keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*).” (Muslih, 2013).

Kepastian hukum menjadi kenyataan bagi setiap individu ketika hukum ditetapkan dalam menghadapi peristiwa nyata. Prinsip dasar yang mendasari hukum adalah ketidakbolehan untuk menyimpang, yang sering dijelaskan dengan

ungkapan "*fiat justitia et pereat mundus*" (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Konsep ini mewakili aspirasi akan kepastian hukum. Kejelasan hukum berfungsi sebagai perlindungan bagi individu terhadap tindakan sewenang-wenang, memungkinkan seseorang untuk mengharapkan hasil yang konsisten dalam situasi tertentu. Masyarakat menginginkan adanya kepastian hukum karena hal ini berkontribusi pada ketertiban. Hukum memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kepastian hukum, seiring tujuannya yang bertujuan untuk menjaga keteraturan dalam masyarakat. Sebaliknya, masyarakat berharap untuk mendapatkan manfaat dari pelaksanaan dan penegakan hukum. Hukum sebagai suatu sistem, ditujukan untuk manusia, dan oleh karena itu, pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberikan manfaat dan kegunaan yang nyata bagi masyarakat. Penting untuk dicatat bahwa hukum tidak selalu sama dengan konsep keadilan. Hukum bersifat universal, mengikat semua individu, dan bersifat merata. Dalam hukum, prinsip ini diterapkan dengan ketat, di mana setiap pelaku tindakan pencurian harus menerima hukuman, tanpa memandang siapa pelakunya. Kepastian hukum secara khusus terkait dengan pandangan positivisme hukum, yang menyatakan bahwa sumber tunggal hukum yakni undang-undang, dan peradilan hanya berarti penerapan undang-undang pada peristiwa konkret. Meskipun demikian, harapan akan keadilan tetap menjadi aspek penting dalam penegakan hukum. Berdasarkan sifatnya, keadilan dapat dianggap sebagai sesuatu yang bersifat subyektif, individualistis, serta tidak mengenal konsep menyamaratakan. Jika penegak hukum menekankan nilai keadilan tanpa memperhatikan nilai-nilai kemanfaatan serta kepastian hukum, maka pelaksanaan hukum tidak akan berjalan dengan efektif. Sebaliknya, jika fokus diberikan pada

nilai kemanfaatan sambil mengesampingkan kepastian hukum serta keadilan, dengan demikian pelaksanaan hukum akan terganggu. Idealnya, dalam menegakkan hukum, nilai-nilai dasar keadilan, sebagai prinsip filosofis, dan nilai-nilai dasar kemanfaatan harus diintegrasikan secara harmonis dan diterapkan secara seimbang secara sosial, sementara nilai dasar kepastian bahwa hukum sebagai sebuah kesatuan juga harus diterapkan secara adil dan seimbang dalam pelaksanaan penegakan hukum. Keadilan dianggap sebagai salah satu tujuan hukum, selain kepastian serta kemanfaatan, yang seringkali menjadi fokus perbincangan. Ada pandangan yang menyatakan bahwa keadilan merupakan tujuan utama, bahkan dianggap sebagai satu-satunya tujuan yang harus dicapai. Sebagai contoh, Bisma Siregar, seorang hakim Indonesia, menyampaikan bahwa “Jika untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan, saya bersedia mengorbankan kepastian hukum, maka hukum itu sendiri pun akan saya relakan. Hukum, pada dasarnya, hanyalah alat, sementara tujuannya adalah tercapainya keadilan. Selain itu, kita perlu memberikan perhatian khusus pada manfaat hukum, karena semua pihak berharap agar pelaksanaan penegakan hukum membawa manfaat. Penting untuk tidak mengabaikan dampak positif hukum agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan di tengah masyarakat. Ketika membahas hukum, kita tidak boleh terpaku hanya pada peraturan perundang-undangan semata, yang terkadang tidak sempurna dan tidak sesuai dengan realitas kehidupan masyarakat”. Sesuai dengan prinsip tersebut diatas, saya sangat tertarik membaca pernyataan Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa : keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap disamping yang lain-lain, seperti kemanfaatan (*utility, doelmatigheid*).

Olehnya itu didalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional (S.H.M.HUM Supriyono, 2016).

Pesatnya pembaharuan hukum di dalam proses persidangan menjadikan tantangan akan pembaharuan hukum ini menjadi efektif dalam penerapannya. Teori Efektivitas Hukum menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektifitas hukum bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma hukum, berarti orang benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana harus berbuat dan benar-benar diterapkan dan dipatuhi.

Menurut Soerjono Siekanto bahwa:

“Teori Efektivitas adalah hukum sebagaimana kaidah merupakan patokan mengenai sikap tidak atau perilaku yang pantas, dalam Tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal ini biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tundak atau perilaku tertentu sehingga dengan tujuannya atau tidak”.

Dalam Hukum Acara Perdata terdapat asas-asas yang harus diperhatikan diantaranya yaitu: (Kamil S.H M.H, 2005)

1. Hakim Bersifat menunggu

Inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan, sedangkan hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan itu. asas ini terdapat dalam pasal 118 HIR/ 142 RBg

“ Hakim tidak boleh menolak untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepanya, pokoknya hakim mengetahui hukumnya (*Ius Curia Novit*)”.

2. Hakim Bersifat Pasif

Hakim hanya berfungsi membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas hakim bersifat pasif ini juga mengisyaratkan adanya balasan kepada hakim untuk tidak dapat mencegah, bila para pihak mencabut gugatannya atau menempuh jalan damai (Pasal 130 HIR/ 154 RBg dan pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970).

3. Hakim Mengadili Kedua Belah Pihak

Di dalam hukum acara perdata kedua belah pihak haruslah diberlakukan sama, tidak memihak dan didengar Bersama-sama. Para pihak harus diberikan kesempatan yang sama untuk menyatakan pendapatnya. Asas ini juga dikenal dengan nama *Audi Et Al Teraam Parterm* (Sesuai dengan pasal 132 a, 121 ayat (2) HIR, pasal 145 ayat (2), 157 RBg, 47 Rv).

4. Putusan Harus disertai Alasan-Alasan

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan putusan yang dijadikan dasar yang mengadili (Pasal 23 Undnag-Undang nomor 14 Tahun 1970, pasal 184 ayat (1), 319 HIR dan pasal 195, 618 RBg).

5. Berperkara di Kenakan Biaya

Untuk Berperkara di peradilan perdata pada asanya dikenakan biaya perkara (Pasal 4 ayat (2) pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 pasal 121 ayat (4), 182 HIR, pasal 154 (4) pasal 192 dan pasal 194 RBg).

Biaya perkara meliputi biaya kepaniteraan, biaya pemanggilan para pihak, biaya pemberitaan, biaya materil dan biaya administrasi (SEMA Nomor 5 Tahun 1994), Bagi orang yang tidak mampu membyara biaya perkara dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri setempat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh Kapala polisi (Pasal 237 HIR, 273 RBg) dalam prakterknya suarat keterangan tidak mampu ini cukup dibuat oleh kepada desa yang disahkan oleh camat daerah pihak yang berkepentingan menetap.

6. Asas Objekktifitas

Pengadilan tidak memihak (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970). Didalam memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan, hakim harus bersifat objektif dan tidak boleh memihak untuk menjamin as aini bagi pihak yang diadili dapat mengajukan keberatan yang disertai alasan-alasan terhadap hakim yang akan mengadili perkaranya, yang disebut hak ingkar *recusatie, wraking* pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970).

7. Persidangan Terbuka Untuk Umum

Asas ini mengisyaratkan bahan siding pemeriksaan di pengadilan bersifat terbuka untuk umum. Hal ini berarti bahwa setiap orang diperbolehkan hadir dan mengikuti jalannya pemeriksaan perkara di persidangan. Sebelum perkara perdata mulia disidangkan, hakim menyetakan bahwa siding perkara tersebut “dibuka” dan dinyatakan “terbuka untuk umum” sepanjang undang-undnang tidak menentukan lain.

F. Metode Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti akan mengadopsi metode penelitian hukum normatif, suatu pendekatan penelitian yang menganalisis dokumen-dokumen kepustakaan atau penelitian serta memanfaatkan berbagai data sekunder. Tahapan-tahapan yang dijalankan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini diimplementasikan melalui metode Deskriptif Analisis, yang dilaksanakan dengan cara menguraikan dan menganalisis peraturan perundang-undangan, teori hukum, doktrin hukum, serta pandangan para ahli. Proses ini mencakup pembuatan gambaran, evaluasi, dan analisis terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku. Metode penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis sistem norma atau kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat, serta memberikan gambaran yang sistematis, faktual, serta akurat terhadap objek penelitian.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, digunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yakni suatu pendekatan yang berlandaskan pada bahan hukum primer, dengan cara mengeksplorasi teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan kepustakaan, di mana penelitian dilakukan melalui studi literatur, meneliti buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen lain yang berhubungan dengan fokus penelitian.

3. Tahap Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan berjalan melalui serangkaian langkah-langkah sebagaimana dibawah :

a. Penelitian Kepustakaan (*library Research*)

Penelitian kepustakaan ini melibatkan akuisisi informasi dan data dengan menggunakan berbagai sumber material yang tersedia di perpustakaan dan internet yang relevan dengan fokus penelitian. Proses penelitian ini dijalankan secara sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, serta menyimpulkan data yang terkait dengan penelitian ini, mencari konsep teori-teori dan doktrin yang terdapat dalam buku-buku yang berhubungan dengan data sekunder. Dalam konteks hukum, penelitian kepustakaan dinilai dari tiga perspektif kekuatan, yang dibagi menjadi tiga jenis diantaranya :

- 1) Bahan Hukum Primer atau yang dikenal juga sebagai bahan hukum positif, merujuk pada norma-norma yang mempunyai kekuatan mengikat serta mempunyai sifat wajib. Ini merupakan sumber utama data yang diperoleh dari sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Terkait Administrasi Perkara Secara Elektronik terkait *E-Court*, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi

Perkata serta Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta diubah menjadi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

- 2) Bahan Hukum Sekunder yakni sumber informasi hukum yang memberi penjelasan atau melengkapi bahan hukum primer yang terkait dengan fokus penelitian penulis. Jenis bahan hukum ini meliputi buku-buku, makalah, jurnal, artikel, hasil penelitian, surat kabar, dan sumber informasi internet lainnya yang cocok terkait topik penelitian yang dilaksanakan.
- 3) Bahan Hukum Tersier merupakan sumber informasi hukum yang tersedia dalam bentuk dokumen atau media, yang setelahnya dianalisis secara kualitatif yang berguna merumuskan pembenaran melalui norma hukum. Fungsi bahan hukum tersier yakni memberi tambahan petunjuk ataupun penjelasan pada bahan hukum primer serta sekunder. Contohnya adalah Wikipedia, kamus Bahasa Inggris serta Belanda yang dimaksudkan untuk memberikan penjelasan terkait Bahasa Inggris dan Belanda yang relevan dalam konteks penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam rangka penelitian berikut, peneliti juga akan melakukan studi lapangan dengan menggali data secara langsung dari sumbernya, melibatkan kegiatan observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen. Dalam proses penelitian ini, penulis akan menyelenggarakan sesi wawancara, yang melibatkan dialog tanya-jawab, dengan hakim atau

pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian yang dilaksanakan.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian Kepustakaan merupakan metode penelitian yang mencakup pengumpulan data dari studi dokumen dengan baha hukum primer, sekunder dan tersier, serta berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, artikel, serta dokumen lainnya yang terkait dengan Persidangan Elektronik (*E-Litigation*) dihubungkan dengan asas terbuka untuk umum sebagai bentuk transparansi keadilan di Pengadilan Majalengka dengan cara membaca, memilih, memilah, membuat catatan dalam bentuk (*Lookbook*) untuk memudahkan atau menginfentarisir materi-materi yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Penelitian Lapangan adalah penlitian yang dilaukan dengan cara mendapatkan informasi secara langsung dari lokasi penelitian melalui pengamatan dan interaksi langsung (Tanya Jawab), serta dokumentasi. Dengan menggunakan Teknik wawancara (Tanya Jawab) kepada Hakim, atau pegawai di pengadilan Negeri Majalengka yang berkaitan dengan Penelitian ini, atau menerapkan metode *Purposive sampling* yakni memilih hakim yang akan di wawancara.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat yang diterapkan untuk menghimpun data pada penelitian berikut mencakup:

- a. Penelitian Kepustakaan

Alat pengumpulan data yang digunakan mencakup peralatan tulis, buku panduan wawancara, laptop, tablet (TAB), dan handphone. Penelitian ini

dilaksanakan dengan metode pencarian dan pengumpulan data, seperti mencari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, serta sumber informasi lain. Tujuannya ialah untuk memfasilitasi peneliti dalam pencarian serta akuisisi data yang dibutuhkan.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dijalankan dengan menghimpun data melalui serangkaian pertanyaan yang disajikan kepada responden yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk mendukung proses penelitian. Selain itu, menggunakan alat pendukung seperti perekam suara atau handphone, serta melaksanakan kegiatan observasi dan dokumentasi.

6. Analisis Data

Proses analisis data mencakup pengolahan data dengan tujuan mengungkap informasi yang memiliki nilai dan kegunaan. Dalam konteks penelitian ini, analisis data dilakukan melalui pendekatan yuridis kualitatif, menggunakan data sekunder (dari literatur) dan data primer (dari lapangan). Data yang diperoleh tersebut disusun dengan metode sistematis dan kemudian dianalisis secara kualitatif melalui proses interpretasi, penafsiran hukum, serta konstruksi hukum.

Dalam rangka penelitian ini, data yang dapat dieksplorasi menggunakan pendekatan analisis yuridis kualitatif adalah data yang bersumber dari norma-norma, asas-asas, serta peraturan perundang-undangan sebagai elemen hukum positif. Proses analisis yang setelahnya dilakukan secara kualitatif, tanpa melibatkan statistik atau rumus-rumus, dan hasilnya akan berwujud dalam bentuk Deskriptif Analisis yang menggambarkan temuan dari penelitian ini.

7. Lokasi Penelitian

Dalam konteks penelitian untuk penulisan hukum, penelitian dilakukan di tempat yang terkait erat dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Lokasi penelitian ini melibatkan:

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang berlokasi di
Jl. Lengkong dalam No.17, Cikawao, Kec. Lengkong Kota Bandung, Jawa Barat 40286.
- 2) Perpustakaan Umum Daerah Majalengka yang berlokasi di
Jl. Cicenang, Kec. Cigasong, Kab. Majalengka, Jawa Barat 45476.

b. Lapangan

- 1) Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II B dimana bertempat di Jl. K.H Abdul Halim No.499, Tonjong, Kec. Majalengka, Kab.Majalengka, Jawa Barat 45414.

8. Jadwal Penelitian

JADWAL PENULISAN HUKUM

Judul Skripsi	:Penerapan Proses Sidang Elektronik (<i>E-Litigation</i>) dihubungkan Dengan Asas Terbuka Untuk Umum Sebagai Bentuk Transparansi Keadilan di Pengadilan Negeri Majalengka
Nama	: Indah Wulansari
No. Pokok Mahasiwa	: 201000097

	Hukum												
8.	Sidang Komprehensif												
9.	Perbaikan												
10	Penjilidan												
11	Pengesahan												

G. Sistematika Penulisan

Pada Penulisan ini, Terdapat beberapa gambaran umum terkait dengan bab-bab yang akan dibawakan dalam rangka berguna mempermudah pemahaman seluruh penelitian, dengan demikian penelitian ini telah diorganisir ke dalam 5 (lima) bagian. Kelima bagian tersebut meliputi:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bagian awal ini, terdapat rangkuman latar belakang studi, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

**PROSES SIDANG ELEKTONIK (*E-LITIGATION*)
DIHUBUNGGAN DENGAN ASAS TERBUKA UNTUK
UMUM SEBAGAI BENTUK TRANSPARANSI**

KEADILAN DI PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA

Bab ini akan diuraikan tentang istilah dan penjelasan mengenai persidangan elektronik (E-Litigation), asas terbuka untuk umum, dan bentuk transparansi keadilan.

BAB III HASIL PENELITIAN PENERAPAN (E-LITIGATION) DI PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA

Bab ini berisikan informasi gambaran umum mengenai pelaksanaan persidangan elektronik (E-Litigation) dihubungkan dengan asas terbuka untuk umum sebagai bentuk transparansi keadilan di pengadilan negeri majalengka dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan persidangan elektronik (E-Litigation).

BAB IV HASIL ANALISIS TERHADAP PENERAPAN (E- LITIGATION) DI PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA

Bagian ini menyelidiki hukum terkait penerapan prinsip keterbukaan untuk umum dalam konteks persidangan elektronik (E-Litigation) di Pengadilan Negeri Majalengka, dampak terhadap transparansi keadilan dalam system persidangan elektronik (E-Litigation), dan hambatan-hambatan atau tantangan yang menghambat asas terbuka untuk umum dalam persidangan elektronik (E-Litigation).

BAB V PENUTUP

Bagian ini menandai akhir dari eksplorasi dalam bab-bab sebelumnya, ditutup dengan sejumlah rekomendasi yang muncul dari temuan penelitian yang relevan.